

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Rumusan Masalah.....	10
I.3. Tujuan Penelitian.....	10
I.4. Manfaat Penelitian.....	11
I.5. Definisi Operasional	12
I.6. Metode Penelitian	15
I.7. Sistematika Penulisan	21

BAB II PERSEROAN TERBATAS

II.1. Konsep Dasar Perseroan Terbatas	24
II.1.1. Pengertian Perseroan Terbatas	24
II.1.2. Perseroan Terbatas adalah Badan Hukum	26
II.1.3. Perseroan Terbatas Didirikan Berdasarkan Perjanjian.....	29
II.1.4. Klasifikasi Perseroan Terbatas	30
II.2. Organ Perseroan Terbatas.....	37
II.2.1. Rapat Umum Pemegang Saham.....	37
II.2.1.1. Kewenangan RUPS.....	38
II.2.1.2. Penyelenggaraan RUPS	40
II.2.2. Dewan Komisaris	42
II.2.2.1. Anggota Dewan Komisaris	43
II.2.2.2. Tugas dan Kewenangan Dewan Komisaris	47
II.2.3. Direksi	47
II.2.3.1. Fungsi dan Kewenangan Direksi.....	48
II.2.3.2. Kapasitas Direksi Mewakili Perseroan Terbatas.....	50
II.2.3.3. Kewajiban dan Tanggung Jawab Direksi	53
II.3. Asas Hukum Penyelenggaraan Tugas Direksi	59
II.3.1. Doktrin <i>Fiduciary Duty</i>	59

II.3.1.1. Pengertian <i>Fiduciary Duty</i>	59
II.3.1.2. Bentuk Pengaturan <i>Fiduciary Duty</i> dalam UU PT	62
II.3.1.3. <i>Fiduciary Duty</i> dalam pelaksanaan tugas Direksi	65
II.3.2. Doktrin <i>Business Judgement Rule</i>	69
II.3.3. Doktrin <i>Piercing The Corporate Viel</i>	71
II.4. Saham	73
II.4.1. Pengertian Saham.....	73
II.4.2. Jenis-jenis Saham.....	74
II.4.3. Pemegang Saham.....	78
II.4.3.1. Pengertian Pemegang Saham	78
II.4.3.2. Perlindungan Pemegang Saham	78

BAB III KASUS POSISI

III.1. PT Pantoru Mas	81
III.2. Rapat Umum Pemegang Saham PT Pantoru Mas...	82
III.3. Susunan Pemegang Saham PT Pantoru Mas	109
III.4. Permohonan Pemanggilan RUPS Luar Biasa.....	109
III.5. Keterangan Saksi Ahli	125
III.6. Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel.	139

**BAB IV TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN
PERMOHONAN NOMOR.246/PDT.P/2017/PN.JKT.SEL.**

IV.1. Proses Pemanggilan RUPS Luar Biasa sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	150
IV.2. Akibat Hukum bagi PT Pantoru Mas dikarenakan Prosedur Permohonan Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa Tidak dilaksanakan sesuai dengan Undang- undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas	159

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	165
B. Saran	166

DAFTAR PUSTAKA	167
-----------------------------	------------

LAMPIRAN